

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar

Fadhil Amir¹, Rudi Hardi², Nur khaerah³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹²³ Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

email: Fadhilamir8@gmail.com¹; rudihardi@unismuh.ac.id²; Nurkhaerah@unismuh.ac.id³

Abstract

The research objective was to see the stages of empowerment and guidance for women who are vulnerable to socio-economics in the aspect of increasing their role in realizing family welfare, especially the ability to overcome problems and the ability to meet basic needs, both physical, psychological and social. The number of informants was 10 people consisting of staff from the Makassar City Social Service, Mamajang sub-district head, non-governmental organizations, WRSE empowerment participants and the general public.: first, preparation, at this stage the Makassar City Social Service focuses on finding and forming field workers who will function as implementers of the WRSE empowerment program in Makassar city. Second, the assessment, the Makassar City government, through the social agency, takes field data regarding the number of people who are included in the WRSE category and formulates an appropriate treatment program according to the community's needs. Third, planning an alternative program, involving the government at the village, sub-district level and also non-governmental organizations to hold discussions regarding steps in forming a program for socially vulnerable women's groups in Makassar City. Fourth, formalization, which as a derivative program of the WRSE empowerment activity corridor development in Makassar City runs in accordance with the regulations of the Perwali city government No.10 of 2015 concerning strategies to accelerate poverty alleviation. Fifth, implementation, in which the WRSE program implementation in Makassar City has not run optimally due to various reasons such as lack of budget, incomplete WRSE data and the problem of the Covid-19 pandemic. Sixth, evaluation, at this stage confirms that the WRSE program in Makassar City has not been implemented in accordance with the program design due to various obstacles. The Office of Social Affairs will correct deficiencies including the increase in the program budget. The seventh termination. The Makassar City Social Service in implementing WRSE empowerment has not yet reached this stage, the empowerment activities will end, however, the program to improve community welfare will continue with different but sustainable program forms. With supporting factors of motivation and cooperation as well as inhibiting factors for lack of budget and the situation of the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Empowerment; WRSE; Stages ;

Abstrak

Tujuan penelitian untuk melihat tahapan pemberdayaan dan pembinaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi pada aspek peningkatan peran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis maupun sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dalam melihat tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar. Melalui wawancara dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Adapun jumlah informan sebanyak 10 orang terdiri dari staf Dinas Sosial Kota Makassar, Camat Mamajang, lembaga swadaya masyarakat, peserta pemberdayaan WRSE dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan 7 indikator dalam mengukur tahapan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya dengan pembahasan sebagai berikut: pertama, Persiapan, pada tahap ini Dinas Sosial Kota Makassar berfokus mencari dan membentuk tenaga lapangan yang akan berfungsi sebagai pelaksana program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar. Kedua, pengkajian, pemerintah Kota Makassar melalui dinas sosial mengambil data lapangan terkait jumlah masyarakat yang masuk kategori WRSE dan merumuskan program penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Ketiga, perencanaan alternative program, dengan melibatkan pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan dan juga lembaga swadaya masyarakat melakukan diskusi terkait langkah dalam membentuk program terhadap kelompok wanita rawan sosial di Kota Makassar. Keempat, pemformalisasi dimana sebagai program turunan dari pembinaan lorong kegiatan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kota Perwali No 10 Tahun 2015 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Kelima, pelaksanaan, dimana dalam implementasi program WRSE di Kota Makassar belum berjalan maksimal karena berbagai alasan seperti kurangnya anggaran, data WRSE yang belum lengkap dan masalah pandemic Covid-19. Keenam, evaluasi, pada tahap ini menegaskan bahwa program WRSE di Kota Makassar belum terlaksana sesuai dengan rancangan program karena berbagai kendala. Dinas Sosial akan memperbaiki kekurangan termasuk dalam penambahan jumlah anggaran program. Ketujuh terminasi. Dinas Sosial kota Makassar dalam pelaksanaan pemberdayaan WRSE belum sampai pada tahap ini, kegiatan pemberdayaan akan berakhir namun program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus berlanjut dengan bentuk program yang berbeda namun tetap berkesinambungan. Dengan faktor pendukung motivasi dan kerjasama serta faktor penghambat kurangnya anggaran dan situasi Pandemi Covid-19

Keywords: Pemberdayaan; WRSE; Tahapan;

*)Penulis Korespondensi

E-mail : : Fadhilamir8@gmail.com

Pembahasan

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, maka lembaga pemberdayaan masyarakat dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar. Perda ini sebagai instrument, dasar hukum dan pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar. Kesejahteraan bertahap Pemberdayaan serangkaian memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang jumlah angka kemiskinannya cukup besar. Terakhir, di tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 66,224 jiwa. Sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan hidupnya secara dapat kegiatan meningkat. merupakan untuk program masyarakat yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar diantaranya Program Donasi Sosial, Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Seperti program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan Beberapa pemberdayaan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus pada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar di Kecamatan Mamajang dengan pertimbangan karena perempuan yang telah berusia 18-59 tahun yang menjadi kepala keluarga tanpa memiliki mata pencaharian tetap dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar sebagai sekretariat pemerintah daerah yang menjalankan program WRSE. Penguatan data hasil observasi dilapangan, wawancara dengan 10 narasumber sebagai penguatan hasil penelitian dan studi pustka dengan mengambil bukti-bukti terkait penelitian yang berbentuk literasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penggunaan teknis analisis menggunakan reduksi data selanjutnya penyajian data dan terakhir pada tahap kesimpulan. Sementara keabsahan penelitian dengan berpatokan kepada triangulasi teknis, triangulasi sumber dan triangulasi waktu

Hasil dan Pembahasan

Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18

- 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu. Kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional (Roeslie & Bachtiar, 2018).

Persiapan yang terlebih dahulu dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar dengan mengecek sejauh mana kesiapan tenaga lapangan dalam mempersiapkan bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan. Pada tahapan tersebut di atur sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar termasuk melakukan diskusi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program tersebut. Definisi dari pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pada komunitas yang operasif ini merupakan suatu respon yang esensial untuk kemudian bisa atau dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi, politik bagi masyarakat yang terdapat didalam kehidupannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan persiapan dalam produktif, dan rekomendasi desa/kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat tahapan pelaksanaan program menggunakan indikator pemberdayaan yang meliputi tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahap pemformalisasi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi dengan pembahasan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Persiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang dari mendapatkan kepala setempat. rangka menyusun agenda dalam program (Wahyuni, 2017). Pemberdayaan masyarakat demi peningkatan ekonomi masyarakat mendapat dukungan dari camat Mamajang. Sementara proses perekrutan petugas lapangan diarahkan agar turut memberdayakan masyarakat yang ada termasuk di setiap kecamatan, dengan demikian para petugas dapat memahami struktur wilayah.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemberdayaan melalui persiapan yang matang dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat guna mendukung salah satu bentuk kegiatan peningkatan kompetensi dan merupakan bagian integral dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diperlukan pengelolaan secara efektif dan adanya koordinasi yang tepat diantara para pegawai atau panitia penyelenggara terhadap diklat yang diselenggarakan sehingga dapat menghasilkan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan.

Tahapan dalam perencanaan pemberdayaan tidak hanya mengarah kepada pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga mengarah kepada peningkatan potensi masyarakat. Hal tersebut tentu harus mendorong para agen pemberdayaan agar benar-benar di persiapkan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Validitas penerima program urgen diketahui agar pemberian bantuan pemberdayaan dimaksud tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sasaran. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima pemberdayaan agar sasaran atau penerima benar-benar orang yang berhak diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat sejatinya upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wanita rawan sosial di Kota Makassar mengarah kepada perempuan yang berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk kemudian di berdayakan secara finansial agar mampu meningkatkan perekonomian agar tercipta kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Namun masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan cenderung tidak tepat sasaran dan justru sebaliknya masyarakat yang berkategori mampu mendapatkan bantuan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam rangka tahap perencanaan proses pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar berfokus kepada perekrutan tenaga lapangan yang akan menjalankan program pemberdayaan. Dimana dalam proses peyediaan tenaga tersebut di sesuaikan dengan jumlah wilayah dan para petugas di berikan bimbingan sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan dilapangan.

Tahapan Pengkajian

Pengkajian adalah tahap awal dari proses pemberdayaan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status sosial masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan (Hapsari, 2016). Dalam melaksanakan program pemberdayaan pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan observasi pada masyarakat untuk melakukan pendataan terkait potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian mengacu dari pendataan tersebut dapat dirumuskan program pemberdayaan. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses pemberdayaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang masyarakat, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah masalah, kebutuhan masyarakat, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan. Pendataan tentang kemampuan ekonomi masyarakat menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah Kecamatan Mamajang, dimana pendataan tersebut dilakukan guna memudahkan pemberian bantuan dari pemerintah dalam upaya melakukan pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang kegiatan masyarakat berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian permasalahan sosial pada sasaran pemberdayaan agar dapat menentukan arah pelaksanaan program pemberdayaan. Melihat permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak mampu berdaya secara ekonomi merupakan langkah yang baik dalam mendorong program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar. Kelompok perempuan memang sering menjadi perbincangan atas ketidakmampuan mereka berdaya seperti kelompok laki-laki sehingga memicu emansipasi. Pada dasarnya perempuan sebenarnya memiliki sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Pemerintah sebagai agen pemberdayaan tentu perlu mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada melalui program pemberdayaan.

Mengkaji permasalahan masyarakat utamanya kaum perempuan dalam kelompok masyarakat tentu akan menemukan berbagai persoalan yang begitu kompleks. Permasalahan seorang wanita yang selalu dianggap tidak memiliki kekuatan fisik seperti laki-laki membuat pemerintah perlu memberikan ruang kepada kelompok wanita agar mampu berdaya secara ekonomi (Marthalina, 2018). Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahap pengkajian dalam proses pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan melakukan pendataan terhadap kelompok perempuan yang akan di berdayakan secara ekonomi melalui penggalan potensi-potensi yang ada. Dinas Sosial tentu akan mudah merumuskan program jika permasalahan tersebut bersifat homogen atau sejenis sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya dalam proses penyelesaiannya. Tetapi yang terpenting proses pengkajian merupakan tahapan yang menentukan arah pelaksanaan program sehingga benar-benar dapat memberdayakan masyarakat utamanya kelompok perempuan rawan sosial ekonomi di Kota Makassar.

Tahap Perencanaan Alternative Program

Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan

alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada (Dewanti, 2010). Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Makassar pada dasarnya telah melibatkan masyarakat dalam menyusun program yang akan dilaksanakan terkait kegiatan pemberdayaan. Permasalahan perempuan yang begitu kompleks serta tidak adanya sinergitas dinas sosial dengan sektor swasta membuat tidak semua keinginan dari masyarakat dapat terealisasi dalam waktu singkat.

Proses analisis keputusan membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Kriteria menunjukkan definisi masalah dalam bentuk yang konkrit dan kadang-kadang dianggap sebagai saran yang akan dicapai. Analisis atas kriteria penilaian dilakukan untuk memperoleh seperangkat standar pengukuran, untuk kemudian dijadikan sebagai alat dalam membandingkan alternatif. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan program menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar kemudian di perhadapkan akan kebutuhan masyarakat yang benar-benar harus dimulai dari tahap pelatihan dan pemberian pengetahuan. Keinginan masyarakat yang bersifat pragmatis tanpa memiliki prospek jangka panjang menjadi sebuah problem yang harus di selesaikan oleh pemerintah.

Setiap kriteria harus menjawab satu pertanyaan penting mengenai seberapa baik suatu alternatif akan dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Keputusan akhir mengharuskan pengambil keputusan untuk memperkirakan bagaimana perbandingan suatu alternatif dengan alternatif yang lainnya dalam kondisi-kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan datang (Nurwati, 2008). Permasalahan yang begitu kompleks di tengah masyarakat mengharuskan pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mendorong program yang akan dilaksanakan dalam upayanya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Kebutuhan yang berbeda-beda itulah menuntut para pemangku kebijakan harus berfikir lebih kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik. Salah satunya melalui pelibatan masyarakat dalam menyusun program-program yang akan dilakukan dalam program pemberdayaan.

Menyusun alternatif program dengan melibatkan masyarakat atau wanita rawan sosial ekonomi sebagai target dan sasaran program pemberdayaan dapat memberi masukan kepada pemerintah Kota Makassar dalam menyusun program. Keterlibatan masyarakat juga sebagai wadah agar pemerintah dapat mengetahui keterbatasan yang ada pada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi tahapan perencanaan alternative program dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dimana Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan kecamatan melakukan diskusi dengan target dan sasaran pemberdayaan terkait kebutuhan yang harus segera dijawab oleh pemerintah agar beban dalam kehidupan dapat berkurang. Melalui keterlibatan kelompok sasaran tersebut di temukan berbagai persoalan, kemudian dari masukan kelompok sasaran tersebut menjadi landasan Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan.

Tahap Pemformalisasi

Pada hakikatnya, kesejahteraan sosial dapat dituju dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Agen pemberdayaan juga membantu gagasan masyarakat agar lebih tertata baik dan formal dalam bentuk tulisan sehingga masyarakat yang membutuhkan proposal dapat mengajukan proposal tersebut guna pencairan dananya kelak (Hermiyanty, 2017). Pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar terlebih dahulu melalui kegiatan sosialisasi dengan menjadikan masyarakat penerima bantuan sebagai peserta. Melalui kegiatan tersebut disimpulkan apa yang menjadi gagasan dari masyarakat penerima bantuan. Seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, dan ritual merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam formalisasi. Berbagai teknik ini pada

dasarnya bertujuan untuk membakukan jabatan dan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kompleksitas organisasi juga sering kali merupakan tindakan untuk membuat organisasi dengan lebih banyak bagian yang bersifat baku sehingga juga meningkatkan formalisasi. Proses pendataan peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Makassar dilakukan pada setiap masing-masing kecamatan dengan berkoordinasi langsung kepada para agen pemberdayaan sebagai tim yang menindaklanjuti pelaksanaan program. Melalui koordinasi tersebut terdaftarlah beberapa nama sebagai penerima bantuan.

Pemformalisasi menunjukkan tingkatan, di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Sentralisasi berkaitan erat dengan corak pembagian otoritas maupun rantai komando yang digunakan dalam sebuah organisasi (Hadi, 2015).

Setiap program memiliki cara pelaksanaannya masing-masing sesuai dengan ketetapan dari pemerintah Kota Makassar. Pentingnya landasan hukum untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pemberdayaan sehingga proses pemberdayaan WRSE di Kota Makassar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Indikator pelaksanaan yang terdiri dari berbagai metode menjadikan rentetan yang sangat panjang dan cenderung membuat masyarakat kurang memahami mekanisme pelaksanaan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui pemberian gagasan kepada pemerintah Kota Makassar dinilai terlalu rumit serta memakan waktu yang cukup lama. Dimana setiap masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan WRSE terlebih dahulu diikuti dalam pelatihan yang hanya bersifat formalitas tanpa hasil yang jelas.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait tahapan pemformalisasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terlebih dahulu dinas sosial melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pemberdayaan WRSE. Dalam sosialisasi tersebut masyarakat dijelaskan terkait pelaksanaan program dengan berbagai tahapan serta landasan hukum kegiatan. Program yang disepakati dalam kegiatan pemberdayaan kemudian dituangkan kedalam lokus yang akan didiskusikan bersama dengan stakeholder terkait. Dinas sosial Kota Makassar juga bertanggung jawab penuh secara aturan dan regulasi terkait pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan yang di ambil tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Kehik, 2018).

Pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di kota Makassar merupakan proses menentukan keberhasilan program dengan menyentuh beberapa kelompok perempuan yang bertindak sebagai kepala rumah tangga akibat dari tidak adanya laki-laki yang bertindak sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tersebut dengan terlebih dahulu memberikan bantuan sembako kepada peserta pemberdayaan. Pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Implementasi program peningkatan kesejahteraan WRSE di kecamatan Mamajang sudah sering dilakukan baik oleh dinas sosial Kota Makassar dengan berkoordinasi terhadap pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kelurahan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah memberikan bantuan terhadap pelaku usaha khususnya kaum perempuan

yang bertindak sebagai kepala rumah tangga. Pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Aneta, 2012). Dalam pelaksanaan pemberdayaan pemerintah kota kadang tidak melaksanakan program sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Dimana kegiatan pemberdayaan yang mengarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat terkadang hanya sebagai formalitas dengan hanya memberikan bantuan berupa materi kepada masyarakat tanpa adanya bimbingan dan pendampingan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, dalam mengambil keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar walaupun berjalan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penyampaian kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan hanya sebatas sosialisasi tanpa adanya program pelatihan sesuai dengan hasil sharing antara masyarakat dan pelaksana pemberdayaan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahapan pelaksanaan dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar belum sepenuhnya berjalan maksimal. Kegiatan pemberdayaan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemberian bantuan sembako dan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tetap merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dari kelompok wanita WRSE di Kota Makassar, selanjutnya program tersebut tetap akan diarahkan sesuai dengan rencana program yang telah disusun.

Tahapan Evaluasi

Evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Pada pelaksanaannya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks dari monitoring. Lalu untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data baseline sebagai acuan dan melakukan perencanaan evaluasi sedari awalseperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan (Sartika, 2011).

Dalam mengukur keberhasilan suatu program dapat dilakukan melalui tahapan evaluasi. Penentuan program pemberdayaan WRSE dapat berlanjut atau tidak tergantung dalam bagaimana bentuk evaluasi. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial mengajak seluruh elemen memberi masukan terkait pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar agar dapat menjadi bahan pertimbangan dari aparaturnya terkait dalam membangun program yang lebih baik.

Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Melalui tahapan evaluasi aparaturnya terkait dapat mendapatkan masukan bagaimana capaian dari pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar. Salah satu kendala terbesar pelaksanaan WRSE di karenakan pandemic Covid-19 yang membuat beberapa anggaran Kota Makassar lebih banyak dipergunakan dalam pencegahan pandemic tersebut. Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan (Sartika, 2011).

Selama ini masyarakat kebanyakan hanya mengharap bantuan kepada pemerintah tanpa adanya upaya dalam memberikan penghidupan yang layak kepada

masyarakat itu sendiri. Persoalan tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan mengubah pola- pola pemberdayaan terlebih mengenai WRSE yang membutuhkan penghidupan jangka panjang. Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Dalam evaluasi target dan sasaran dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar cenderung tidak efektif dan bertolak belakang dari apa yang telah direncanakan. Dimana dalam pelaksanaan program tidak ada bentuk pelatihan dan pendampingan seperti apa yang di katakana dalam sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat sebagai peserta. Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahapan evaluasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terlihat belum berjalan maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa persoalan seperti situasi pandemi, kekurangan anggaran, serta banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Evaluasi ini menjadi proses penilaian apa kekurangan dari pelaksanaan program, sehingga menjadi acuan dalam peningkatan program yang dilakukan selanjutnya.

Tahapan Terminasi

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Ketika masyarakat dianggap telah berdaya secara ekonomi maka pemerintah akan memberhentikan kegiatan pemberdayaan atau berpindah dengan sasaran yang lain. Setiap masyarakat yang terdaftar dalam program pemberdayaan WRSE akan di lepas untuk kemudian mengelola usaha secara mandiri jika telah dilakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan cara agar masyarakat lebih berdaya dan tidak terus bergantung terhadap pemerintah Tujuan dari pemberdayaan biasanya dapat memperkuat kekuasaan masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam ekonomi, keterampilan serta dalam hal pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah itu akan ada program baru yang berkesinambungan dengan program sebelumnya seperti kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang harus selalu terpenuhi.

Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar pada dasarnya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan kepada wanita yang bertindak sebagai kepala keluarga yang menjadi harapan dari keluarga, sehingga membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah. Walau program pemberdayaan telah dilaksanakan namun pemerintah tetap harus memberikan perhatian melalui bentuk program yang lainnya. Setiap masyarakat ada kekuatan terstruktur yang bekerja untuk mengadakan perubahan dan ada pula yang mengusahakan stabilitas. Keduanya diperlukan untuk kelangsungan masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan hadir untuk memastikan kedua aspek tersebut dapat terwujudkan. Sehingga masyarakat tidak terus bergantung dan mengharapkan bantuan terhadap pemerintah (Usman & Husna, 2020).

Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan potensi yang dimiliki untuk mengelola sumber daya yang ada pada prospek peningkatan kesejahteraan tidak hanya berhenti dalam kegiatan pemberdayaan. Walau pada dasarnya masyarakat harus mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah tetapi pada kelompok wanita tentu harus mempunyai pengecualian terlebih dalam struktur sosial masyarakat wanita selalu mendapat diskriminasi. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Ketika pemerintah telah mewujudkannya melalui kegiatan pemberdayaan, selanjutnya pemerintah akan membuat program untuk memecahkan masalah yang lainnya.

Kegiatan pemberdayaan dikatakan terlaksana dengan baik jika sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang termasuk pada wilayah pembinaan WRSE di Kota Makassar. Setelah pemberian bantuan usaha dan permodalan namun masyarakat masih tetap membutuhkan pemerintah pada proses pendampingan. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan pada tahapan terminasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar pemerintah akan menghentikan proyek pemberdayaan jika target dan sasaran benar-benar telah berdaya secara ekonomi. Namun tetap akan melaksanakan proses pendampingan dan perlindungan kepada kelompok WRSE yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan masyarakat.

Faktor Yang Melatarbelakangi Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Makassar

Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan sosial. Kondisi perempuan rawan ekonomi mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan keluarga dan bermasyarakat, maka perlu ada pemberdayaan bagi mereka.

Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi berjalannya program tersebut, yang kemudian penulis uraikan dalam hasil pembahasan sebagai berikut:

Motivasi

Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak pemerintah bila menginginkan setiap program pemberdayaan dapat memberikan andil positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan, karena dengan motivasi seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persoalan kemiskinan di kota-kota besar seperti Makassar merupakan permasalahan yang tidak pernah selesai untuk dibicarakan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan termasuk melalui pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut menjadi faktor yang mendorong pemerintah Kota Makassar melakukan kegiatan pemberdayaan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi kerja dapat memacu pemerintah untuk bekerja keras sehingga dapat meningkatkan produktifitas pelayanan dan akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pemberdayaan.

Motivasi dapat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar. Pemerintah yang memiliki motivasi tinggi adalah birokrasi yang senantiasa membuat program yang mengarah kepada pelayanan terhadap masyarakat umum termasuk mengurangi kemiskinan.

Kerjasama

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang paling utama. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena adanya kesamaan tujuan yang akan dicapai. Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dapat berjalan dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Kegiatan pemberdayaan tidak akan efektif tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung program tersebut. Keterlibatan masyarakat sebagai sasaran menjadi acuan pelaksanaan sebuah program. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang

yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Program pemberdayaan tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari sesama instansi pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri sebagai sasaran pemberdayaan. Kerjasama dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan program WRSE di kota Makassar mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Dinas Sosial selalu melibatkan semua pihak untuk memberikan masukan dan saran dalam perbaikan program.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan ada dua indikator yang mendukung pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar yaitu motivasi dan kerjasama. Motivasi disini merupakan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Tekad pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan menjadi motivasi pelaksanaan program. Selanjutnya kerjasama dengan melibatkan beberapa unsur dalam memberikan saran serta masukan mulai pada proses perencanaan sampai kepada tahap evaluasi sehingga program dapat terus berjalan dan ditingkatkan.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat.

Segala bentuk kegiatan pemerintah termasuk pelaksanaan pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya anggaran yang cukup dalam memenuhi semua tahapan pelaksanaan program. Pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar cenderung terlaksana namun kurang optimal dikarenakan minimnya anggaran yang direalisasikan dalam program tersebut.

Anggaran digunakan oleh pemerintah tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu. Kekurangan anggaran akan membuat program berjalan tidak optimal. Untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi dalam sebuah program pemberdayaan agar menyediakan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan target sasaran. Pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan menggali potensi yang ada pada masyarakat selanjutnya dikelola sebagai sebuah komoditi dalam memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Kegiatan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar juga menetapkan langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat namun karena keterbatasan anggaran kegiatan pemberdayaan menjadi tidak efektif.

Pandemi Covid-19

Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Berbagai kebijakan pemerintah dibuat dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Berbagai regulasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam rangka memutus penyebaran pandemic Covid-19 termasuk pembatasan sosial berskala besar yang membuat beberapa kegiatan perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. Persoalan tersebut membuat pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada kelompok kecil saja namun seluruh masyarakat yang ada

di Kota Makassar. Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peran masyarakat sesuai dengan Undang-undang adalah, untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Seperti yang diatur dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa, masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik. Selain membuat perekonomian masyarakat lumpuh kondisi pasca munculnya Covid-19 membuat masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan tidak banyak berkegiatan diluar rumah bahkan beberapa instansi pemerintahan pelayanan publik tidak lagi bekerja seperti biasa dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terdapat dua masalah yaitu keterbatasan anggaran dan pandemi Covid 19. Kebutuhan dalam melaksanakan program pemberdayaan WRSE tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia dari APBD Kota Makassar, sehingga beberapa kegiatan yang telah di rencanakan termasuk proses pelatihan tidak dapat dilakukan. Kemudian permasalahan Covid-19 yang melanda dunia juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Dimana aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan pelaksanaan pemberdayaan, sehingga pemerintah Kota Makassar perlu memikirkan opsi baru dalam menjalan setiap program yang belum dilaksanakan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Tahap Persiapan, pada tahap ini Dinas Sosial Kota Makassar berfokus mencari dan membentuk tenaga lapangan yang akan berfungsi sebagai pelaksana program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar. Tahap pengkajian, pemerintah Kota Makassar melalui dinas sosial mengambil data lapangan terkait jumlah masyarakat yang masuk kategori WRSE dan merumuskan program penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Tahap perencanaan alternative program, dengan melibatkan pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan dan juga lembaga swadaya masyarakat melakukan diskusi terkait langkah dalam membentuk program terhadap kelompok wanita rawan sosial di Kota Makassar. Tahapan pemformalisasi dimana sebagai program turunan dari pembinaan lorong kegiatan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kota Perwali No 10 Tahun 2015 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Tahapan pelaksanaan, dimana dalam implementasi program WRSE di Kota Makassar belum berjalan maksimal karena berbagai alasan seperti kurangnya anggaran, data WRSE yang belum lengkap dan masalah pandemic Covid-19. Tahapan evaluasi, pada tahap ini menegaskan bahwa program WRSE di Kota Makassar belum terlaksana sesuai dengan rancangan program karena berbagai kendala. Dinas Sosial akan memperbaiki kekurangan termasuk dalam penambahan jumlah anggaran program. Tahapan terminasi. Dinas Sosial kota Makassar dalam pelaksanaan pemberdayaan WRSE belum sampai pada tahap ini, kegiatan pemberdayaan akan berakhir namun program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus berlanjut dengan bentuk program yang berbeda namun tetap berkesinambungan. Faktor pendukung, program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar walau terkesan pelaksanaannya terlalu terburu-buru namun tetap berjalan karena faktor motivasi pemerintah yang mendorong pengurangan angka kemiskinan di Kota Makassar dan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti pemerintah kelurahan, Kecamatan, lembaga swadaya masyarakat dan target atau sasaran program. Faktor penghambat kurangnya anggaran pelaksanaan WRSE di Kota Makassar menjadi salah satu alasan tidak maksimalnya pelaksanaan program di tambah kondisi pandemic

Covid-19 membuat pelaksanaan untuk sementara di hentikan karena semua instansi pemerintahan fokus terhadap program pengendalian penyebaran Covid-19.

Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar maka penulis mengajukan saran berdasarkan hasil observasi dilapangan yaitu: Dalam mengikuti program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar, masyarakat sebagai sasaran yang terdaftar dalam program seharusnya mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar benar-benar memahami prosedur pelaksanaan kegiatan. Dinas Sosial kota Makassar sebagai pelaksana program benar-benar harus melaksanakan semua tahapan program dengan baik termasuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program pemberdayaan WRSE yang optimal. Sebaiknya program wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dilakukan dengan membentuk kelompok usaha bersama agar lebih mudah dikoordinir dan tidak memakan anggaran yang banyak.

Ucapan Terimakasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

Daftar Pustaka

- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Dewanti, I. S. (2010). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro : Kendala Dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Hadi, A. P . (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Hapsari. (2016). Pengkajian Program Kursus Dan Pelatihan Terkait Dengan Jenis Keterampilan, Sertifikasi Dan Penempatan Lulusan. *Journal of Nonformal Education*.<https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5314>
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). Landasan Teori (Pemberdayaan Masyarakat). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1-58.
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Agrimor*.
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (indikator 8: kesehatan jiwa) di Kota Depok Tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*.
- Sartika, I. (2011). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*.

- Usman, R. D. A., & Husna, N. (2020). Strategi Dalam Melakukan Terminasi Pada Kekerasan Seksual Anak Di Lrsampk Darussa'adah. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16404>
- Wahyuni, S., Machfudz, M., & Badrih, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Melalui Pemberantasan Buta Aksara Guna Menumbuhkembangkan Usaha Kreatif Berbasis Literasi dan Potensi Lokal. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.